

LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pertanian No. Tlp (0766) Fax (0766) 8001002

Daftar isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I Pendahuluan	5
A. Latar Belakang	5
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Tugas dan Fungsi	6
D. Struktur Organisasi	6
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	9
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	10
Bab III Akuntabilitas Kinerja	12
A. Pengukuran Kinerja	12
B. Analisis Kinerja	13
C. Realisasi Anggaran	21
D. Analisis Efisiensi	22
Bab IV Penutup	23

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umum.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS



NIP. 19860625 201001 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah di tandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis terdapat 4 (empat) sasaran dan 9 (Sembilan) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis telah dicapai, Dari 9 (sembilan) indikator terdapat 8 (delapan) indikator menunjukkan capaian > 100% predikat kinerja sangat tinggi, 1 (satu) indikator menunjukkan capaian >318,10%, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Untuk sejumlah target IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mana pada tahun ini sudah mencapai target namun tetap harus mempertahankan hingga kedepannya pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik lagi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai subbagian yang terdiri dari

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Peralatan;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Sumber daya Air, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sungai, Pantai, dan Danau;
 - c. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Irigasi dan Rawa.

4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Jembatan; dan
 - c. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Jalan.

5. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Jalan dan Jembatan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Jabatan Fungsional Jalan dan Jembatan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemeliharaan Jembatan; dan
 - c. Jabatan Fungsional Jalan dan Jembatan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemeliharaan Jalan.

6. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Keciaptakaryaan;
 - b. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.

7. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Penataan Ruang Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengaturan dan Pembinaan;
 - b. Jabatan Fungsional Penataan Ruang Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

8. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:

- a. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan dan Pembangunan Teknis;
- b. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengujian dan Peralatan.

9. Unit Pelaksana Teknis (UPTD).

- a. Kepala UPT Workshop Kecamatan Mandau
- b. Kepala UPT Workshop Kecamatan Rupert
- c. Kepala UPT Workshop Kecamatan Bukit Batu
- d. Kepala UPT Laboratorium

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah	Panjang Infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik	480,08 7 Km	528,09 6 Km	576,104 Km	6s24,113 Km	672,122 Km	720,131 Km
	Persentase luas kawasan bebas banjir	78,10%	79,10%	81,10%	83,10%	85,10%	87,10%
Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	60,76%	61,08%	61,73%	62,71%	64,01%	65,64%
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	58,03%	60,53%	63,03%	65,53%	68,03%	70,53%
	Persentase garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	26,83%	27,65%	29,30%	30,95%	32,59%	34,24%
	Jumlah Unit Air Baku dalam kondisi baik	4 Unit	4 Unit	5 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit

Sasaran	Indikator	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik	70,04%	71,04%	73,49%	75,77%	75,85%	78,59%
Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target
Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah.	Panjang Infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik	528,096 Km
	Persentase luas kawasan bebas banjir	79,10%
Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	61,08%
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	60,53%
	Persentase garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	27,65%
	Jumlah Unit Air Baku dalam kondisi baik	4 Unit
	Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik	71,04%
Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	90,00%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah.	Panjang Infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik	528,096 Km	167.986,78 Km	318,10%
	Persentase luas kawasan bebas banjir	79,10%	89,94%	113,70%
Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	61,08%	61,08%	100%
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	60,53%	60,53%	100%
	Persentase garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	27,65%	30,50%	110,31%

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah Unit Air Baku dalam kondisi baik	4 Unit	100%	100%
	Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik	71,04%	71,29%	100,35%
Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	90,00%	90,00%	100,00%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100,00%

B. Analisis Kinerja

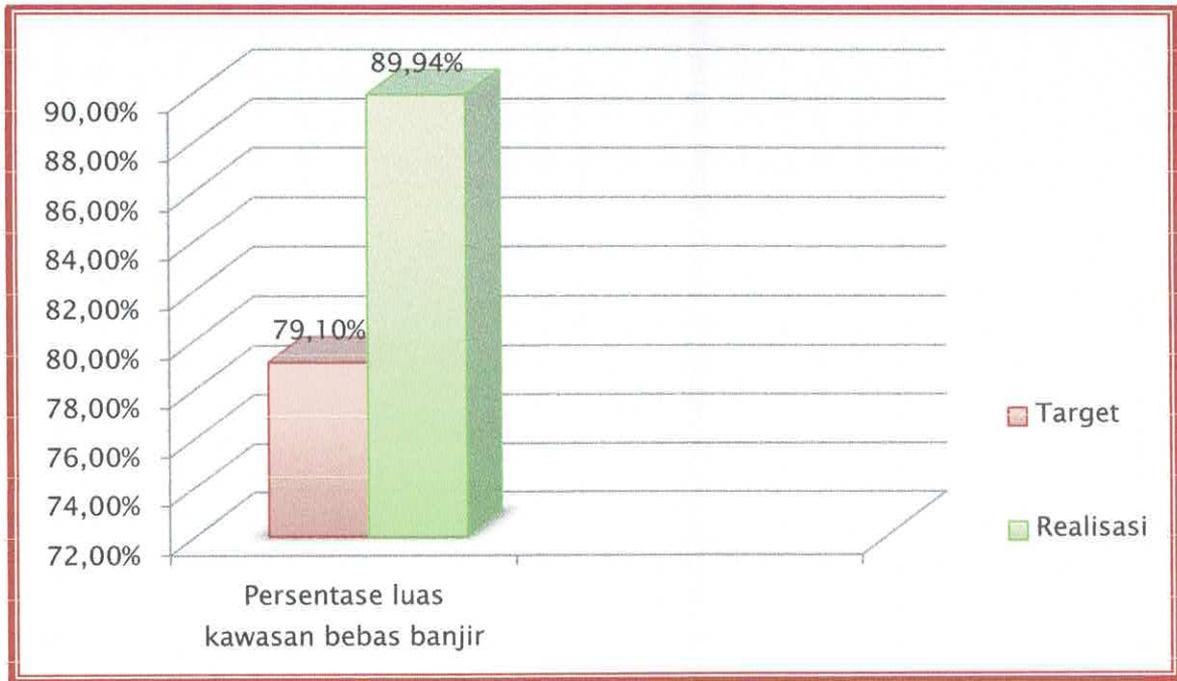
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 9 (sembilan) indikator terdapat 8 (delapan) indikator menunjukkan capaian > 100% predikat kinerja sangat tinggi dan 1 (satu) indikator menunjukkan capaian > 318,10% predikat kinerja sangat tinggi. Dapat dilihat untuk indikator Panjang Infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik ini menunjukkan realisasi yang sangat tinggi mencapai 318,10 % ini dikarenakan pada saat menentukan target pada renstra 2021-2026 target yang di tentukan hanya untuk pembangunan jalan sesuai SK yaitu jalan poros tidak termasuk target pembangunan jembatan, pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan. Sehingga pada saat dihitung realisasi 2022 untuk pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan mencapai target yang sangat tinggi yaitu 318,10%. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut.

Sasaran 1

Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah.

Indikator	2021	2022		Capaian 2021 thdp 2022
	Capaian	Target	Realisasi	
Panjang Infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik	-	528,096 Km	167.986,78 Km	318,10%
Persentase luas kawasan bebas banjir	-	79,10%	89,94%	113,70%
Rata-rata Capaian				215,90%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat terlihat bahwa tingkat capaian indikator Sasaran Strategis 1 : Panjang Infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik sudah mencapai target yang ditetapkan karena Berdasarkan SK Bupati Bengkalis Nomor 209/KPTS/IV/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten tahun 2018 jumlah panjang ruas jalan Kabupaten Bengkalis berjumlah 1.257,10 KM yang sebelumnya pada SK Bupati Nomor 24/KPTS/I/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten tahun 2016 berjumlah 1.485,78 KM, dikarenakan ruas jalan sepanjang 37,04 KM kewenangannya diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau. Jumlah peningkatan jalan yang dibangun pada tahun 2022 berjumlah 40,39 Km, Panjang jembatan yang diganti /dilebarkan 30 M, Panjang jalan yang dipelihara 167,95 Km dan Panjang jembatan yang dipelihara 361,50 M . Sedangkan Untuk Persentase luas kawasan bebas banjir dari target 79,89% terealisasi 89,94% dengan catatan dihitung berdasarkan kajian pemetaan potensi genangan banjir Kabupaten Bengkalis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 dengan luas pembanding banjir diluar kawasan hutan dan perkebunan berdasarkan pola ruang. Dari data yang di peroleh Panjang Infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik dan Persentase luas kawasan bebas banjir sudah melebihi realisasi capaian kinerja yang maksimal dari target penetapan kinerja. Sedangkan untuk kolom capaian 2021 datanya tidak kita isi karna sudah tidak sesuai dengan Indikator Kinerja dan target renstra 2021- 2026.

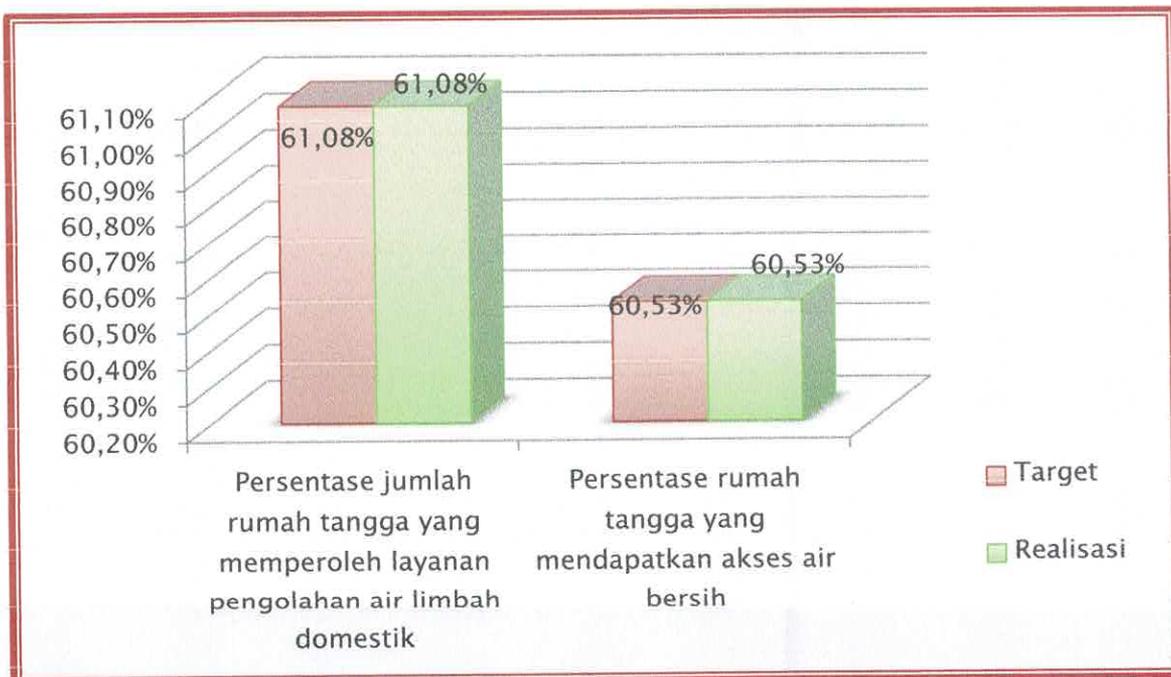


Sasaran 2

Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas;

Indikator	2021	2022			Capaian 2021 thdp 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	61,08%	61,08%	100%	
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	-	60,53%	60,53%	100%	
Rata-rata Capaian				100%	

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat terlihat bahwa tingkat capaian indikator Sasaran Strategis 2 : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dan Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih sudah mencapai realisasi capaian kinerja yang maksimal dari target penetapan kinerja. Sedangkan untuk kolom capaian 2021 datanya tidak kita isi karna sudah tidak sesuai dengan Indikator Kinerja dan target renstra 2021-2026.

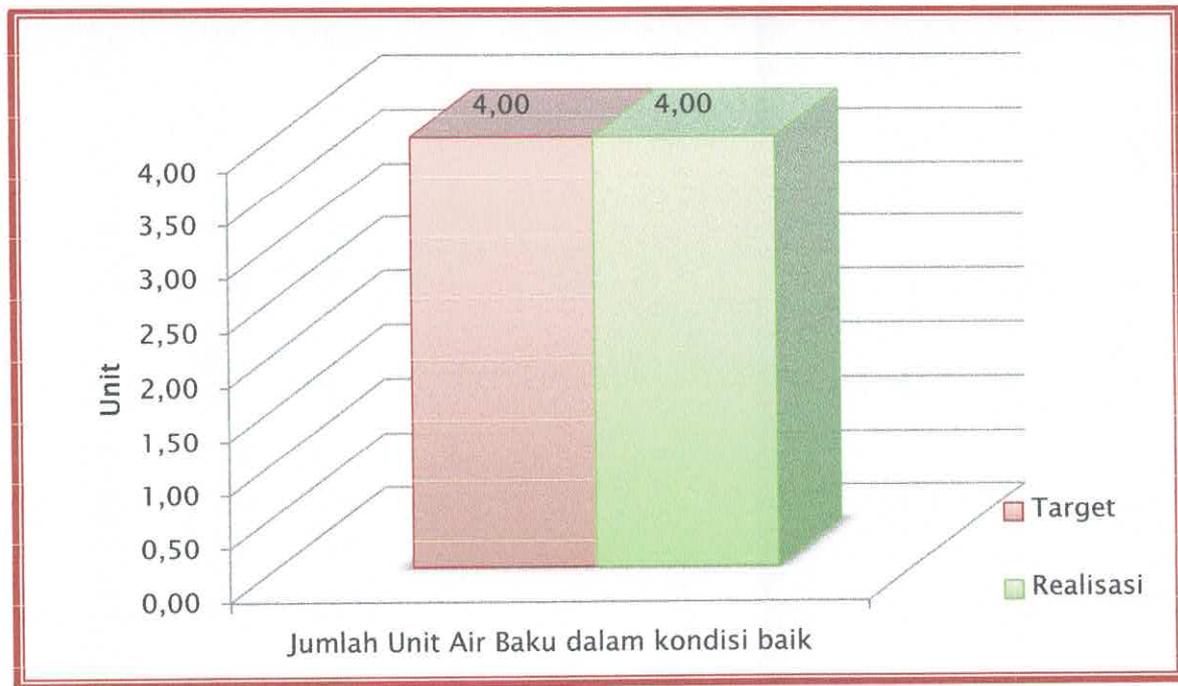
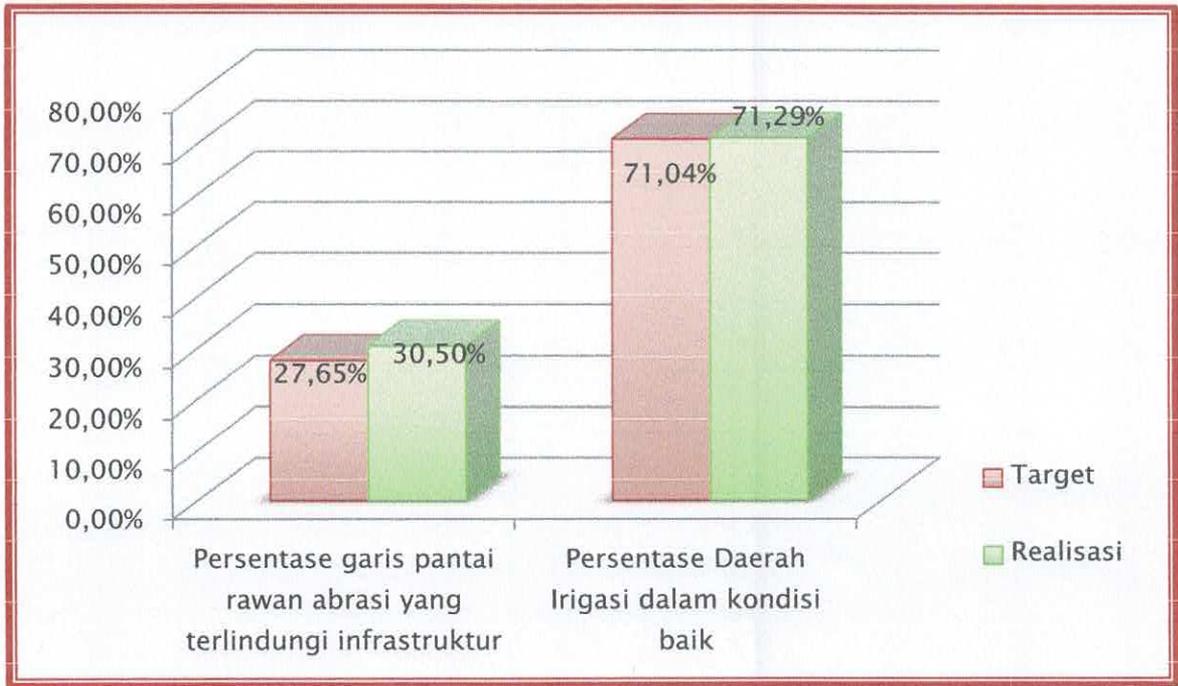


Sasaran 2

Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas;

Indikator	2021	2022			Capaian 2021 thdp 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	-	27,65%	30,50%	110,31%	
Jumlah Unit Air Baku dalam kondisi baik	-	4 Unit	4 Unit	100,00%	
Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik	-	71,04%	71,29%	100,35%	
Rata-rata Capaian				103,55	

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat terlihat bahwa tingkat capaian indikator Sasaran Strategis 2 : Persentase garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur sudah mencapai realisasi capaian kinerja yang maksimal dari target penetapan kinerja, dengan catatan persentase garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur melalui dana APBD adalah sebesar 26,87% yaitu hanya terbangun 96 Meter dari target awal 2 Km. Namun persentase garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur secara keseluruhan adalah sebesar 30,50% yaitu dari pembangunan yang dilaksanakan oleh APBN sepanjang 3.077 Meter. Sedangkan Jumlah Unit Air Baku dalam kondisi baik sudah mencapai target 100% dan Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik 71,29%, dapat disimpulkan dari 3 Indikator diatas sudah mencapai realisasi capaian kinerja yang maksimal dari target penetapan kinerja. Sedangkan untuk kolom capaian 2021 datanya tidak kita isi karna sudah tidak sesuai dengan Indikator Kinerja dan target renstra 2021-2026.

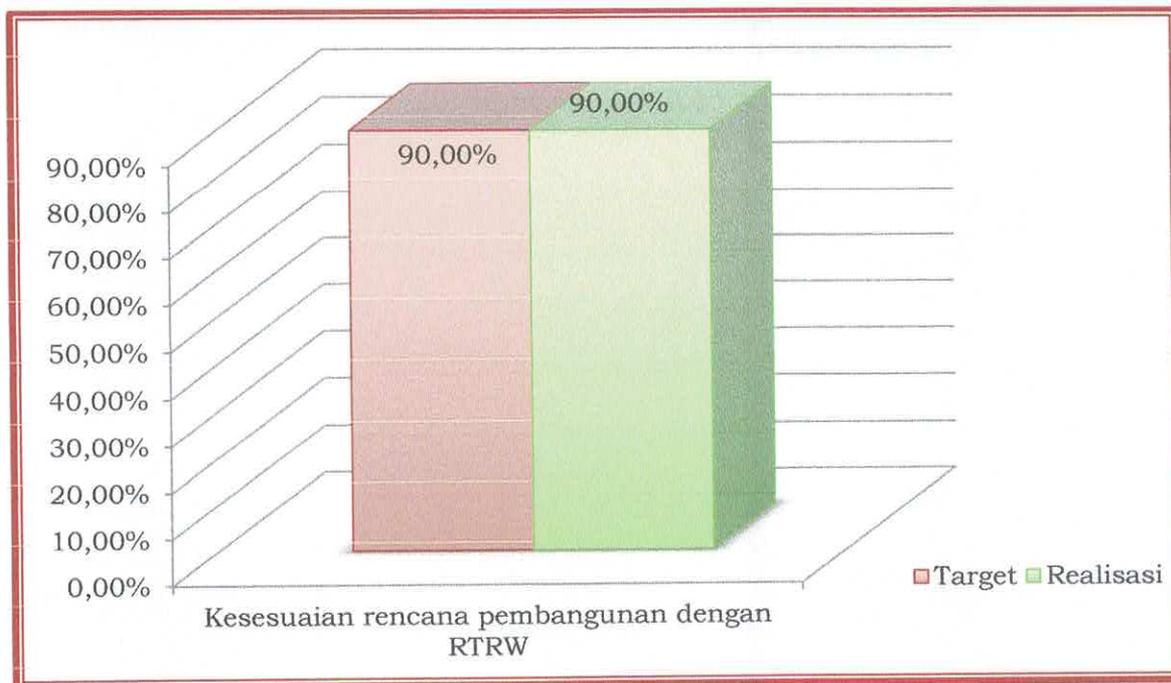


Sasaran 3

Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup;

Indikator	2021	2022		Capaian 2021 thdp 2022
	Capaian	Target	Realisasi	
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		90,00%	90,00%	100,00%
Rata-rata Capaian				100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat terlihat bahwa tingkat capaian indikator Sasaran Strategis 3 : Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW, sudah mencapai realisasi capaian kinerja yang maksimal dari target penetapan kinerja. Sedangkan untuk kolom capaian 2021 datanya tidak kita isi karna sudah tidak sesuai dengan Indikator Kinerja dan target renstra 2021-2026.

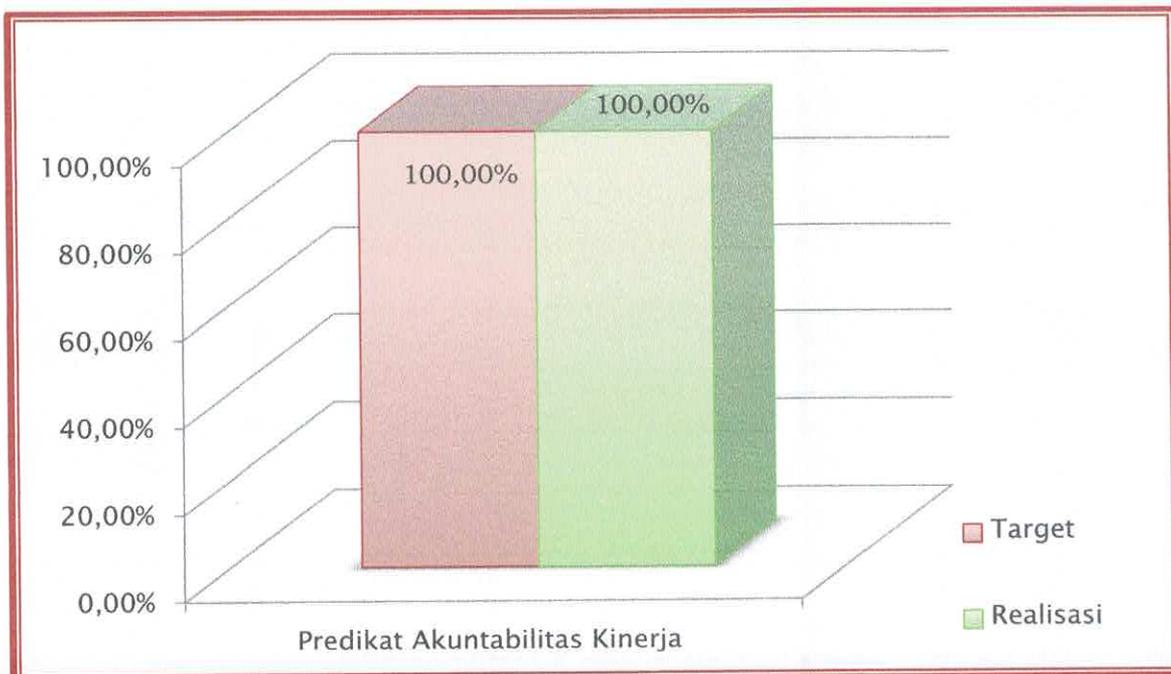


Sasaran 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Indikator	2021	2022			Capaian 2021 thdp 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	100,00%	
Rata-rata Capaian				100,00%	

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat terlihat bahwa tingkat capaian indikator Sasaran Strategis 4 : Predikat Akuntabilitas Kinerja, pada tahun 2022 nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bengkalis sudah mendapatkan nilai BB Dinas PUPR sudah melengkapi data tindak lanjut evaluasi sapis pada Inspektorat kabupaten Bengkalis pada tahun 2022, Sehingga dinas PUPR sudah mencapai realisasi capaian kinerja yang maksimal dari target penetapan kinerja. Sedangkan untuk kolom capaian 2021 tidak ada data karna pada tahun 2021 kita tidak memiliki indikator kinerja tersebut.



C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022 Alokasi Belanja langsung Dana yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah sebesar Rp.719.578.383.500 yang terdiri dari 11 Program, 24 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir 31 Desember 2022 sebesar Rp. 675,838,758,940 atau sebesar 93,92 % dengan realisasi fisik sebesar 96,17%. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas 96,68%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup; yaitu 72,99%. Dapat dilihat Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2022 sebagai berikut:

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1. Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah	68,27%	500.310.612.226	466.374.774.681	93,22%
2. Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	102,66%	168.895,004,323	163,293,945,436	96,68%
3. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup	100,00%	2.835.228,000	2.069.328.618	72,99%
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	100,00%	719.578.383.500	675.838.758.940	93,90%

D. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Capaian Kinerja %	Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah	102,13%	96,68%	3,32%
2	Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	102,13%	96,68%	3,32%
3	Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup	100,00%	72,99%	27,01%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	100,00%	93,90%	6,10%

Pada Tabel diatas dapat kita lihat untuk Tingkat Efisiensi yang paling tinggi terdapat pada ndikator Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar Kawasan yaitu 224,88% sangat tinggi karna capaian kinerja untuk target tersebut mencapai 318,10 %, ini dikarenakan pada saat menentukan target pada renstra 2021-2026 target yang di tentukan hanya untuk pembangunan jalan sesuai SK yaitu jalan poros tidak termasuk target pembangunan jembatan, pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan. Sehingga pada saat dihitung realisasi 2022 untuk pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan mencapai targret yang sangat tinggi yaitu 318,10%.

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis telah dicapai, . Dari 9 (sembilan) indikator terdapat 9 (delapan) indikator menunjukkan capaian > 100% predikat kinerja sangat tinggi. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mana pada tahun ini sudah mencapai target namun tetap harus mempertahankan hingga kedepannya pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 terdapat Dari 9 (sembilan) indikator Dari 9 (sembilan) indikator terdapat 8 (delapan) indikator menunjukkan capaian > 100% predikat kinerja sangat tinggi dan 1 (satu) indikator menunjukkan capaian >318,10% predikat kinerja sangat tinggi, (Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis. Namun demikian untuk tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan di bidang Ke-PU-an
2. Melengkapi data-data pendukung sesuai dengan kinerja dilapangan
3. Peningkatan sarana peralatan kantor seperti Komputer, Laptop, Proyektor, Printer, Mesin Fotocopy dan lain-lain

4. Pemberian Penghargaan/Reward bagi ASN yang berprestasi
5. Penegakan disiplin ASN
6. Suasana kantor yang nyaman dan kondusif

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
BENGKALIS



ARDIANSYAH, ST, MT

Pembina (IV/a)

NIP. 19860625 201001 1 012